



INTERNALISASI PERSIAPAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

PADA JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA



**Yogyakarta,
14-18 Februari 2022**



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Internalisasi Pembangunan ZI

- 1. Pedoman Pembangunan ZI sesuai Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021** terutama pada komponen pengungkit (pemenuhan + reform) dan komponen hasil
- 2. Syarat Pengajuan dan Pengusulan** Satuan Kerja menuju WBBM
- 3. Kalender Kerja** Evaluasi TPI
- 4. Evaluasi Pembangunan ZI**
 - a. Hasil Panel TPI Tahun 2021
 - b. Catatan Itjen pada setiap Pokja
 - c. Catatan Faktor Gugurnya Satker
- 5. Penjelasan LKE Permenpan RB No 90 Th 2021**



PEDOMAN PEMBANGUNAN ZI

SESUAI PERMENPAN RB NOMOR 90 TAHUN 2021

KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ZI



Penilaian Secara Berjenjang

Mensyaratkan adanya proses penilaian berjenjang sebelum diajukan ke TPI yaitu adanya penilaian berjenjang dari Unit Kantor Wilayah dan Unit Eselon I Pembina.



PERMENPAN NOMOR 90 TAHUN 2021



Perubahan Syarat Pengajuan dan Penetapan

1. Perubahan syarat pengusulan satker menuju WBK dan WBBM.
2. Perubahan syarat penetapan satker menuju WBK dan WBBM

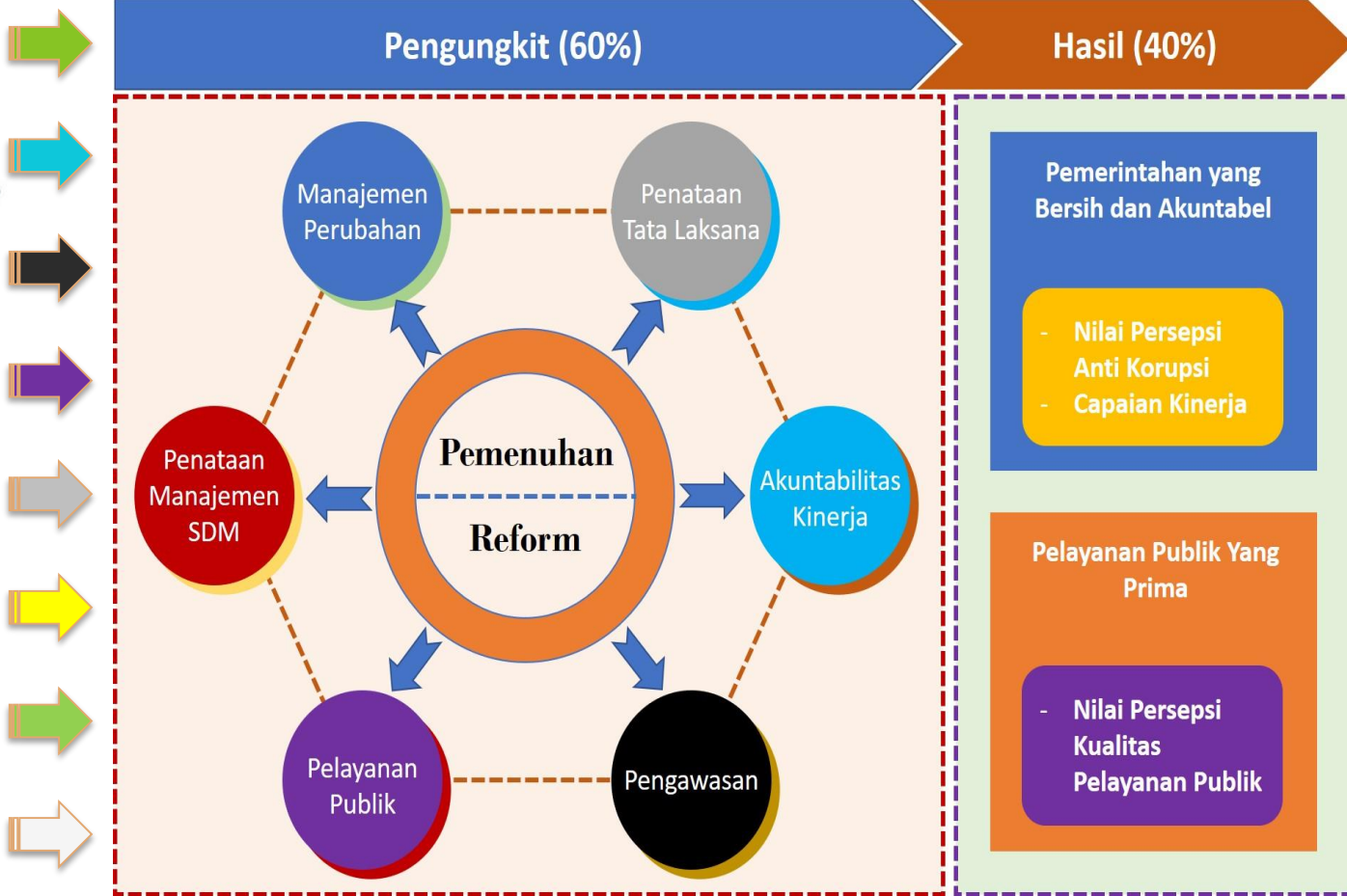
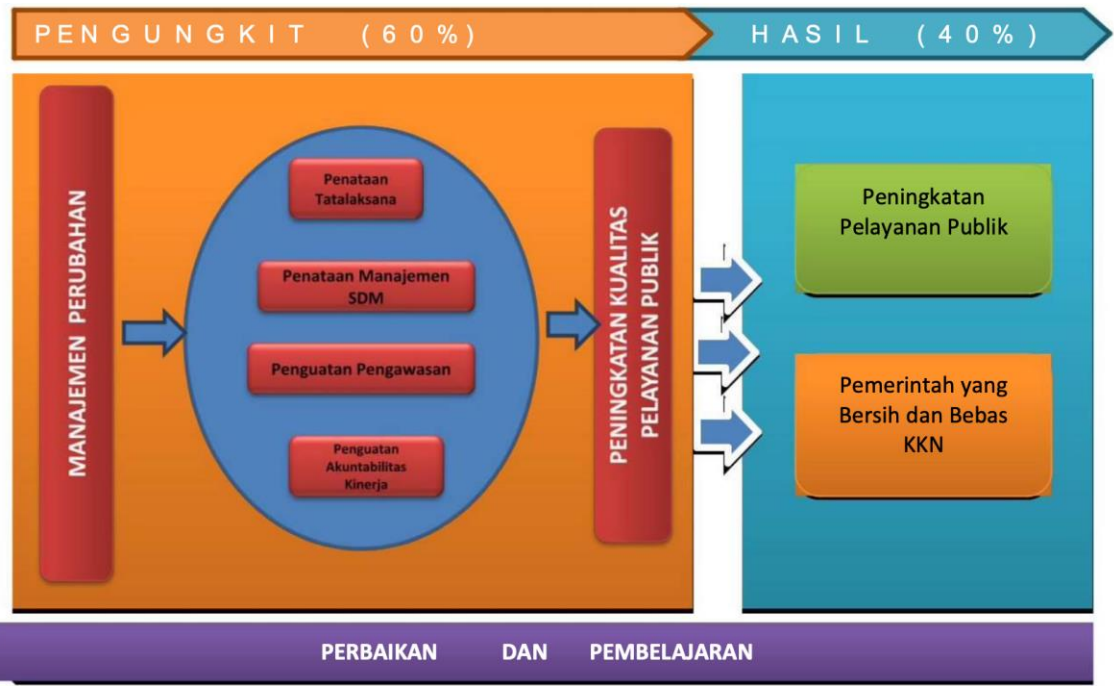


Mencabut Ketentuan Lama

Mencabut Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

LAMA

BARU



HIGHLIGHT PERUBAHAN PERMENPAN RB

PERUBAHAN PERMENPAN RB

KOMPONEN
PENGUNGKIT

60%

PERMENPAN RB
NOMOR 10
TAHUN 2019

KOMPONEN
HASIL

40%

PERMENPAN RB TERBARU

PERMENPAN RB NOMOR 90 TAHUN 2021

KOMPONEN
PENGUNGKIT

PEMENUHAN

30%

KOMPONEN
REFORM

30%

KOMPONEN
HASIL

40%

No	Uraian Komponen	LKE ZI 2019			LKE ZI 2021		
		Bobot Area	Bobot Minimal Area WBK	Bobot Minimal Area WBBM	Bobot Area	Bobot Minimal Area WBK	Bobot Minimal Area WBBM
A	Komponen Pengungkit	60	40	48	60	40	48
A1	Pemenuhan				30	18	22,5
1	Manajemen Perubahan	8,0	4,8	6,0	4,0	2,4	3,0
2	Penataan Tatalaksana	7,0	4,2	5,2	3,5	2,1	2,62
3	Penataan Manajemen SDM	10,0	6,0	7,5	5,0	3,0	3,75
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10,0	6,0	7,5	5,0	3,0	3,75
5	Penguatan Pengawasan	15,0	9,0	11,25	7,5	4,5	5,62
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,0	6,0	7,5	5,0	3,0	3,75
A2	Komponen Pengungkit Reform				30	18	22,5
1	Manajemen Perubahan	-	-	-	4,0	2,4	3,0
2	Penataan Tatalaksana	-	-	-	3,5	2,1	2,62
3	Penataan Manajemen SDM	-	-	-	5,0	3,0	3,75
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	5,0	3,0	3,75
5	Penguatan Pengawasan	-	-	-	7,5	4,5	5,62
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	5,0	3,0	3,75
B	Komponen Hasil	40	34,5	36,5	40	32,25	35,26
1	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	20,0	18,5	18,5	22,50	18,25	19,50
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15,0	13,5	13,5	17,50	15,75	15,75
b	Tindak Lanjut Hasil pengawasan (TLHP) - Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0	5,0	5,0	5,0	2,5	3,75
2	Kuaitas Pelayanan Publik	20,0	16,0	18,0	17,50	14,0	15,76
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	20,0	16,0	18,0	17,50	14,0	15,76
NILAI TOTAL EVALUASI ZI		100	75	85	100	75	85

SYARAT PENGAJUAN WBK DAN WBBM

SYARAT PENGUSULAN WBK / WBBM

SYARAT	Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	
	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Predikat SAKIP minimal "B"	Predikat SAKIP minimal "BB"
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal BB untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	-	
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%	
	LHKASN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"

PENILAIAN BERJENJANG

Penilaian **Berjenjang** Dalam Pengusulan Satker WBK dan WBBM

Berdasarkan Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 disebutkan bahwa

pengusulan satuan kerja menuju WBK dan WBBM dilakukan secara berjenjang

mulai dari Penilaian Pendahuluan yang dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama di Tingkat Wilayah hingga Penilaian Pendahuluan pada Pimpinan Tingkat Madya di Unit Eselon I Pembina.

SATUAN KERJA
Unit kerja melakukan pembangunan ZI di internal serta melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi(LKE).

01



PENILAIAN PENDAHULUAN KANWIL

Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil **melakukan pembinaan sekaligus verifikasi dan penilaian LKE unit kerja.**

02



PENILAIAN PENDAHULUAN UNIT ESELON I

Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Eselon I melakukan pembinaan dan penilaian terhadap seluruh unit kerja dibawahnya

03



PENILAIAN TPI

Melakukan pembinaan, asistensi, dan penilaian terhadap seluruh unit kerja di Kemenkumham

04



05



TIM PENILAI NASIONAL

TAMBAHAN KRITERIA OLEH TPN

Pada saat melaksanakan evaluasi, **TPN memastikan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) unit kerja/satuan kerja telah sesuai/melebihi dengan target perencanaan kinerjanya.**

Selain itu, apabila **indikator kinerja utama** yang digunakan **mempunyai standar target nasional**, maka capaian kinerja unit tersebut **minimal harus sama** atau **melebihi target nasional** yang ada.

KALENDER KERJA EVALUASI TPI

ASISTENSI TPI



JANUARI SD MARET

- FGD Persiapan Evaluasi
- Workshop Persiapan Evaluasi
- Bimtek Penilaian LKE ZI
- Penilaian dan Verifikasi Unit Kanwil
- Penilaian Unit Pimpinan Tinggi Madya
- Pengajuan Satker ke TPI

EVALUASI DAN PANEL TPI



APRIL SD MEI

- Evaluasi TPI
- Panel TPI
- Penetapan Satker WBK dan WBBM oleh Menkumham
- Pengajuan Satker melalui PMPZI Menpan RB
- Integrasi data dengan PMPZI

MONEV WBBM



JUNI SD JULI

Monev Satuan Kerja yang sudah mendapatkan predikat WBBM pada tahun ke 2

EVALUASI TPN



AGUSTUS SD DESEMBER

- Survei TPN
- Desk Evaluasi TPN
- Verifikasi Lapangan TPN
- Penetapan Satker WBK dan WBBM oleh TPN

EVALUASI

PEMBANGUNAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM TAHUN 2021

JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA



REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

HASIL TPI DAN PANEL TPI TAHUN 2021



NO	NAMA SATKER	HASIL TPI	HASIL PANEL TPI	KET
1	Kanim Kelas I TPI Yogyakarta	88,42	88,29	GAGAL WBBM
2	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	87,91	87,62	GAGAL WBBM
3	LPKA Kelas II Yogyakarta	85,6	86,52	GAGAL WBBM
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	88,9	89,54	GAGAL WBBM
5	Rutan Kelas IIB Bantul	87,49	87,33	GAGAL WBBM
6	Rupbasan Kelas II Wates	88,37	88.00	BERHASIL WBBM
7	LPP Kelas IIB Yogyakarta	80,21	80,74	GAGAL WBK
8	Rutan Kelas IIB Wates	84,96	85,6	GAGAL WBK
9	Bapas Kelas I Yogyakarta	81,09	80,69	GAGAL WBK
10	Bapas Kelas II Wonosari	80,2	80,32	GAGAL WBK
11	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	82,52	81,7	GAGAL WBK
12	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	81,43	82,2	GAGAL WBK
13	Rupbasan Kelas II Wonosari	83,08	83	GAGAL WBK
14	Rupbasan Kelas II Bantul	83,02	82,01	GAGAL WBK
15	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	82,9	82,57	GAGAL WBK
16	Lapas Kelas IIB Sleman	88,49	85,18	BERHASIL WBK

CATATAN POKJA 1

1. Mekanisme penentuan Tim Kerja

Pembangunan ZI belum sepenuhnya melalui mekanisme yang jelas dan tergambar dalam dokumen data dukung;

2. **SK Rencana Aksi WBK WBBM** belum memuat terkait **target prioritas** dalam ZI dan capaian atas target tersebut;

3. **Laporan monev belum secara komprehensif** menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam monev dan hasil monev tersebut serta bagaimana tindak lanjut atas hasil monev tersebut;

4. **Agen perubahan baru sebatas penetapan**, belum ada kejelasan mengenai kontribusi agen perubahan terhadap organisasi.

1. **Proses evaluasi atau perbaikan SOP** belum dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa SOP sebelum dan sesudah serta dokumen usulan SOP perbaikan;
2. Pada beberapa satker, **laporan monev belum secara komprehensif** menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam monev dan hasil monev tersebut serta bagaimana tindak lanjut atas hasil monev tersebut;
3. **Inovasi yang dibuat belum dituangkan dalam SOP**;
4. **Belum dilakukan monev terhadap pemanfaatan IT** dalam pengukuran kinerja satker, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan publik;
5. **Belum terdapat laporan pelaksanaan kegiatan tim PPID**;
6. Dalam menyediakan informasi, **hanya sebagian informasi** yang dapat **diakses** secara mutakhir dan lengkap.

CATATAN POKJA 2

CATATAN POKJA 3

1. Belum terdapat data dukung pertimbangan **detil penempatan pegawai**;
2. Belum terdapat pertimbangan detil **rencana pengembangan kompetensi pegawai** ;
3. Belum dilakukan **analisis kebutuhan diklat** sehingga belum meratanya kesempatan mengikuti diklat;
4. Belum maksimal melaksanakan **pengembangan kompetensi pegawai** secara mandiri;
5. **Laporan monev belum secara komprehensif** menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam monev dan hasil monev tersebut serta bagaimana tindak lanjut atas hasil monev tersebut;
6. Belum semua melampirkan dokumen yang menunjukkan **persentase kesenjangan kompetensi pegawai**;
7. Dalam perencanaan **usulan rotasi**, belum menunjukkan bahwa kompetensi menjadi dasar pertimbangan;
8. Belum dilakukan **assessment** untuk mutasi internal pegawai;
9. Belum terdapat **inovasi penerapan disiplin / kode etik pegawai**.

1. Belum terdapat dokumen terkait **IKU tambahan** yang mendukung **pelayanan publik**;
2. Unit Kerja telah membuat laporan kinerja namun **belum memberikan informasi yang memadai tentang capaian kinerja**;
3. Belum terdapat **dokumentasi terkait adanya keterlibatan seluruh pimpinan** dalam rangka penyusunan perencanaan, serta **hasil tindak lanjut hasil monev** yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja;
4. Masih terdapat unit kerja yang **belum menyesuaikan Perjanjian Kinerja nya** dengan tugas dan fungsi unit kerja.

CATATAN POKJA 4

CATATAN POKJA 5

1. **Belum terdapat dokumen** yang menggambarkan kegiatan **pengawasan dan monitoring** terhadap pelayanan sebagai bentuk upaya membangun lingkungan pengendalian;
2. **Belum seluruh satker** melampirkan dokumen kegiatan **public campaign terkait pengendalian gratifikasi**;
3. Belum terdapat **Inovasi** terkait pelaksanaan **SPIP**;
4. Belum terdapat **Inovasi** penanganan **pengaduan**;
5. Belum terdapat **inovasi** dalam **pengendalian risiko**;
6. Dokumen **manajemen risiko belum sesuai** dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko;
7. Pemetaan terhadap **benturan kepentingan belum menyeluruh**;
8. Belum ada **inovasi** terkait pelaksanaan **Whistle Blowing System**, masih merupakan turunan dari Eselon I.

1. **Maklumat pelayanan** belum memuat unsur :
 - Menjelaskan siapa yang melakukan pelayanan;
 - Menjelaskan jenis layanan yang diselenggarakan; dan
 - Menjelaskan punishment apabila layanan tidak dilaksanakan sesuai janji pada Maklumat;
2. Belum terdapat **Inovasi pemberian kompensasi layanan**;
3. Belum terdapat **mekanisme punishment** bagi pelaksana layanan yang melakukan pelanggaran;
4. Belum terdapat **sarana layanan terpadu/terintegrasi**;
5. **Inovasi di layanan publik** masih sekedar formalitas, belum dapat menjawab permasalahan / urgensi yang terjadi;
6. **Belum terdapat survei mandiri secara berkala**;
7. **Hasil survey** terhadap layanan belum **dipublikasikan** kepada masyarakat.

CATATAN POKJA 6

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

1. Perlu meningkatkan kualitas dokumen pengungkit seluruh Pokja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dokumen Laporan Tindak Lanjut yang berkaitan dengan Laporan Monitoring dan Evaluasi setiap bulannya.
 - b. Laporan yang bersifat berkala Triwulan menjadi setiap bulan (lebih intens)
 - c. Memaksimalkan evaluasi terhadap reviu SOP pelayanan internal dan eksternal yang sesuai dengan kondisi di lapangan
 - d. Memperhatikan kesesuaian lampiran laporan (foto, tanggal, notula, presensi dan nota dinas)
2. Memaksimalkan dokumen data dukung pada LKE yang belum mendapatkan nilai A
3. Memperhatikan pengisian survey IPK dan IKM dan jumlah responden

FAKTOR GUGURNYA SATKER



KOMITMEN PIMPINAN

Terdapat unit kerja yang pimpinan dan **seluruh anggota unit kerja belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik tentang ZI**, hal ini ditunjukkan dengan belum mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan/tugas sehari-hari;



PETA RESIKO

Terdapat unit kerja yang **belum memiliki peta risiko yang komprehensif untuk memitigasi setiap potensi-potensi terjadinya pelanggaran integritas**, misalnya pelanggaran kewenangan, gratifikasi, benturan kepentingan, pungli, praktik percaloan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas sehari-hari yang belum masuk dalam peta risiko unit kerja;



MANAJEMEN ADUAN

Terdapat unit kerja yang **belum sepenuhnya efektif dalam penanganan aduan** pengguna layanan/*stakeholder*. Masih terdapat aduan yang belum direspon dengan baik



CAPAIAN KINERJA

Terdapat unit kerja yang **inovasinya belum optimal mendorong capaian kinerja utama**, penguatan integritas, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, serta mengatasi isu strategis



SURVEI IPP DAN IPAK

Terdapat unit kerja yang **tidak memenuhi kriteria survei**

INFO TAMBAHAN

1. Penilaian SAKIP akan dilakukan oleh Itjen setelah satuan kerja lolos Panel TPI
2. Segera memulai melakukan pemenuhan data dukung pada GDRIVE masing-masing Satker sembari menunggu aplikasi erb di buka
3. Seluruh data dukung disesuaikan dengan format pusat yang dapat diakses pada **<https://bit.ly/FORMAT2022>**



TERIMA KASIH

“Semoga di tahun ini Jajaran Kanwil
Kemenkumham D.I. Yogyakarta **berhasil
memperoleh predikat WBK dan WBBM**”.



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

